

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah belum memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi di Indonesia.
2. Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi di Indonesia.
3. Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi di Indonesia.
4. Dana Alokasi Khusus memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk dapat mengembangkan penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan dapat menjelaskan faktor-faktor lain yang dapat menjadi pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia sehingga penelitian selanjutnya terkait bidang yang serupa akan lebih bertautan dan bermanfaat.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dan implikasi yang ditemukan, di antaranya:

1) Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan pada setiap Pemerintah Provinsi memiliki format pelaporan yang berbeda-beda sehingga peneliti kesulitan untuk mendapatkan informasi yang terperinci dari setiap Pemerintah Provinsi terkait penelitian yang dilakukan.

2) Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan dan mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar kebutuhan daerah juga dapat terpenuhi serta menjaga tingkat kemandirian daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah juga diharapkan lebih memperhatikan tingkat penggunaan keuangan daerahnya agar tingkat pelayanan di daerah juga dapat lebih optimal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD pada setiap Pemerintah Provinsi di Indonesia salah satunya dapat dilakukan penguatan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan mengenai pengelolaan PAD sesuai ketentuan peraturan perundangan.